

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Data Informasi Bencana dan catatan BPBD Kabupaten Kerinci atau instansi yang menangani penanggulangan bencana sebelum adanya BPBD, terdapat beberapa jenis bencana yang dominan yang telah mengancam Kabupaten Kerinci. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi bencana banjir 54 kejadian, tanah longsor 33 kejadian, gempa bumi 3 kejadian, kebakaran gedung dan pemukiman 128 kejadian, kebakaran lahan 13 kejadian, angin puting beliung 24 kejadian, bencana sosial dan kerusuhan 2 kejadian dan orang hilang/tenggelam 9 kejadian. Dari frekwensi kejadiannya kebakaran gedung dan pemukiman adalah kejadian dengan probabilitas tinggi, bencana banjir dan tanah longsor menempati urutan kedua dan ketiga namun dampak terbesar ditimbulkan oleh banjir dan tanah longsor. Secara lengkap rekapitulasi 5 tahun (2012-2017) seperti lampiran 1

Bencana yang terjadi tersebar di 16 Kecamatan, dengan wilayah terdampak dominan Kecamatan : Air Hangat Timur, Kayu Aro Barat, Gunung Kerinci, Siulak Mukai, Depati VII, Batang Merangin, dan Gunung Raya. Bencana tersebut mengakibatkan korban, kerugian, kerusakan infrastruktur terjadi pada zona bencana intensitas yang tinggi, seperti kerusakan jalan-jalan, jembatan, dan lain-lain, sehingga menghambat akses transportasi ke wilayah tertentu pascabencana.

Berdasarkan data dan informasi Bencana Indonesia dan BPBD Kabupaten Kerinci serta catatan sejarah kejadian 2012–2017, bahwa bencana telah mengakibatkan ; korban jiwa 10 orang, luka-luka orang 11, mengungsi 2302 orang, terdampak 7817 orang. Kerusakan rumah: 143 unit rusak berat, 109 unit rusak sedang, 5347 unit rusak ringan. Kerusakan pada fasilitas umum dengan kerusakan: 13 unit fasilitas Kesehatan, 13 unit fasilitas pendidikan, 219 unit rumah ibadah, sarana dan prasara wilayah berupa kerusakan jalan dan jembatan sepanjang 5098 meter. Kerusakan lahan pertanian seluas 505 hektar. Selain itu juga mengakibatkan hilang atau matinya ternak

sebanyak 3643 ekor. Secara lengkap dampak dari bencana seperti pada lampiran 2.

Dari data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di kabupaten Kerinci belum optimal untuk mengurangi risiko bencana, terjadi fluktuasi yang bervariasi dari periode waktu mulai 2012- 2017.

Peringatan dini daerah melalui media masa sudah dilakukan namun belum maksimal, mengakibatkan belum siapnya daerah mengambil keputusan evakuasi sehingga dapat terjadi kepanikan. Kondisi ini dipicu juga oleh kurang optimalnya sistem dan saluran informasi bencana melayani kebutuhan masyarakat. Terbatasnya kemampuan perangkat daerah dalam mengumpulkan data dan mendistribusikan bantuan akibatnya terjadi ketidaktepatan sasaran pemberian tindakan dan bantuan.

Kebijakan mengurangi risiko bencana telah diakomodir dalam Rencana Penanggulangan Bencana (2013- 2018), Renstra BPBD yang merupakan bagian dari RPJM Kabupaten Kerinci 2014-2019. Rencana-rencana tersebut berpedoman pada RPJM BNPB, Rencana aksi Pengurangan Bencana BNPB tahun 2006-2009 dan peraturan perundang-undangan yang relevan , namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala di pihak penyelenggara atau masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana dalam bentuk :

- a. Rencana strategis BPBD untuk jangka waktu 5 tahun (2016-2019).

Rencana strategis tersebut berisi :

Pada bagian pertama Pendahuluan bagian ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Sedangkan pada bagian kedua Gambaran Pelayanan OPD bagian ini memuat Tugas- Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD serta Sumber Daya BPBD, Visi, misi , tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

- b. Rencana Penanggulangan Bencana untuk periode 2013 -2018 yang berisi :

Gambaran umum wilayah dan Kebencanaan Kabupaten Kerinci.

Kajian risiko bencana terdiri dari : ancaman bencana, kerentanan, kapasitas, kebijakan penanggulangan bencana terdiri dari visi dan misi, strategi, sasaran, kaedah pelaksanaan, fokus program. Dari kajian yang paparkan dalam RPB Terdapat 3 tingkat ancaman dengan tingkat ancaman dan skala indek penduduk terpapar yaitu : tingkat ancaman rendah yaitu bencana Cuaca ekstrim, Epidemii dan wabah penyakit. Tingkat ancaman sedang untuk bencana Banjir, Gempa

bumi, Kebakaran, kekeringan, Tanah longsor, Kebakaran. Bencana dengan tingkat ancaman tinggi sampai saat ini di Kabupaten Kerinci belum ada. Tingkat ancaman dan skala indek tersebut tidak seluruhnya sudah ditetapkan tetapi baru untuk 8 jenis bencana untuk ancaman bencana yang lain seperti: Letusan Gunung Api, Bencana Sosial (Kerusuhan, Komplik sosial) belum ditetapkan tingkat ancaman (RPB- BPBD Kabupaten Kerinci). Tingkat ancaman tersebut sebagaimana dalam Lampiran 3

c. Rencana Kontijensi

Dari studi literatur diketahui bahwa BPBD Kabupaten Kerinci sampai saat ini baru mempunyai rencana kontijensi banjir dan tanah longsor, berdasarkan informasi dari BPBD bahwa pemilihan ancaman bencana dan probabilitas terjadinya maka maka banjir dan tanah longsor yang paling sering terjadi dan mempunyai dampak besar terhadap masyarakat dan infrastruktur. Untuk itu Rencana kontijensi yang diprioritaskan adalah Rencana kontijensi banjir dan tanah longsor, rencana kontijensi ini dalam satu dokumen mengingat banjir erat hubungan dengan tanah longosor.

Dokumen rencana kontijensi banjir dan tanah longsor yang disusun untuk menghadapi ancaman bencana tahun 2016-2017 berisi: Pendahuluan, penilaian bahaya, penentuan kejadian, pengembangan skenario dampak bencana, penetapan tujuan, strategi tanggap darurat, perencanaan klaster, dan rencana tindak lanjut.

Sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut mengacu kepada :

- a. UU.RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
- b. UU.RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah.
- c. PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- e. PP Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- f. Rencana Program Jangka Menengah BNPB
- g. Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci
- h. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kerinci.

- i. Perda Kabupaten Kerinci Nomor 13 tahun tahun 2011 tentang pembentukan Ortala Daerah Kabupaten Kerinci
- j. Dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Berdasarkan rekapitulasi data informasi bencana, rekapitulasi dampak kejadian di Kabupaten Kerinci dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terlihat pelaksanaan kebijakan belum optimal. Dari dugaan, pemikiran dan acuan tersebut, penulis selanjutnya akan mengkaji, RPJMD, Renstra BNPB Kabupaten Kerinci, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontigensi. Kajian tersebut disajikan berupa tesis berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kerinci”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Seberapa efektifkah pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kerinci periode tahun 2013 – 2018 dalam pengurangan risiko bencana ?
- 2) Jika tidak atau kurang efektif, apa penyebab kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci ?
- 3) Bagaimana Rekomendasi terhadap Pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kerinci ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kerinci berdasarkan (temuan) penanggulangan bencana tahun 2016-2017.
- 2) Mengkaji penyebab efektif dan tidak efektifnya Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kerinci.
- 3) Memberikan rekomendasi alternatif terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kerinci.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagi pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan penanggulangan bencana pada masa mendatang.

- 2) Bagi masyarakat, dengan pelaksanaan kebijakan yang efektif dapat mengurangi korban dan kerugian.
- 3) Sebagai referensi untuk penelitian dan perencanaan penanggulangan bencana selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci dari data dan informasi bencana tahun 2012 - 2017. Populasi penelitian adalah : Seluruh personil di BPBD Kabupaten Kerinci, Dinas dan instansi terkait, LSM, BUMD/BUMN, Perguruan Tinggi, pemerintah Kecamatan dan desa terdampak, tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat terdampak dari 7 kecamatan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini, terdiri dari 5 (lima) bab :

BAB I Pendahuluan : latar belakang, rumusan masalah, Tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi teori tentang : efektifitas, penanggulangan bencana, Kebijakan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana dan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III Metodologi penelitian terdiri dari : Lokasi Penelitian, kerangka pikir, tahapan penelitian, metodologi penelitian Jenis dan sumber data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan terdiri dari :
Efektifitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci, Temuan yang mempengaruhi tingkat efektifitas dan rekomendasi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci.

BAB V Kesimpulan dan saran,

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran